



REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

Nomor : 2748 /Dt.6.3/05/2013
Lampiran : 1 (satu) lampiran
Perihal : **Dukungan Pokja AMPL Provinsi dan
Kabupaten/Kota dalam rangka
Pelaksanaan Program Pamsimas II**

Jakarta, 7 Mei 2013

Kepada Yth. :
(daftar terlampir)
di - tempat

Dengan hormat,

Menindaklanjuti surat kami terdahulu Nomor 2154/Dt.6.3/05/2013 tanggal 15 April 2013, perihal Dukungan Pokja AMPL Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam rangka Pelaksanaan Pamsimas II, dengan ini disampaikan beberapa hal yang perlu menjadi perhatian Saudara antara lain:

1. Sampai tanggal 5 Mei 2013, Pokja AMPL Kabupaten/Kota di 40 lokasi Pamsimas II (dari total 96 kabupaten/kota) telah membentuk Panitia Kemitraan (Pakem)(*status terlampir*)
2. Pelatihan Pakem direncanakan dilaksanakan pada minggu ke-3 Mei 2013 di 10 provinsi pelaksana Pamsimas. Bagi provinsi yang belum membentuk Pakem diharapkan segera membentuk Pakem selambat-lambatnya pada minggu ke-3 Mei 2013
3. Surat Keputusan Ketua Pokja AMPL Kab/Kota tentang Pembentukan Pakem dan daftar nama anggota Pakem yang akan mengikuti pelatihan agar disampaikan kepada Sekretariat Pokja AMPL Nasional melalui Fax: (021) 31904113 atau email kepada end.rejeki@gmail.com. (*contoh tabel daftar nama anggota Pakem terlampir*)
4. Konfirmasi pelatihan selanjutnya dapat menghubungi sdr. Endang Sri Rejeki (Sekber Pamsimas) (Hp: 081341021299/085215649285).

Demi kelancaran proses pembentukan Pakem diperlukan partisipasi aktif Pokja AMPL/Pokja Sanitasi untuk mengkoordinir dan memantau realisasi pembentukan Pakem di kabupaten/kota masing-masing.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Direktur Permukiman dan Perumahan
Ketua Pokja AMPL Nasional



(Signature)
Nugroho Tri Utomo

Tembusan kepada Yth.:

1. Bapak Deputi Bidang Sarana dan Prasarana
 2. Direktur Pengembangan Air Minum, Ditjen Cipta Karya, Kementerian PU
 3. Direktur Fasilitasi Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup, Ditjen Bina Bangda Kemendagri;
 4. Direktur Penyehatan Lingkungan, Kementerian Kesehatan
-

Kepada Yth.:

Ketua Pokja AMPL Provinsi dan Kabupaten/Kota Lokasi Pamsimas Ildi:

1. Provinsi Sumatera Barat
 - 1.1. Kota Padang
 - 1.2. Kota Sawahlunto
 - 1.3. Kab. Agam
 - 1.4. Kab. Dharmasraya
 - 1.5. Kab. Tanah Datar
 - 1.6. Kab. Pasaman Barat
 - 1.7. Kab. Sijunjung
 - 1.8. Kab. Padang Pariaman
 - 1.9. Kab. Lima Puluh Kota
 - 1.10. Kab. Solok Selatan
 - 1.11. Kab. Pesisir Selatan
 - 1.12. Kab. Solok
 - 1.13. Kab. Pasaman
2. Provinsi Sumatera Selatan
 - 2.1. Kab. OKI
 - 2.2. Kab. Muara Enim
 - 2.3. Kab. Lahat
 - 2.4. Kab. Musi Rawas
 - 2.5. Kab. Musi Banyu Asin
 - 2.6. Kab. OKU Selatan
 - 2.7. Kab. OKU Timur
 - 2.8. Kab. Ogan Ilir
3. Provinsi Riau
 - 3.1. Kab. Kuantan Singingi
 - 3.2. Kab. Indragiri Hulu
 - 3.3. Kab. Indragiri Hilir
 - 3.4. Kab. Kampar
 - 3.5. Kab. Rokan Hulu
 - 3.6. Kab. Bengkalis
4. Provinsi Banten
 - 4.1. Kab. Lebak
 - 4.2. Kab. Serang
5. Provinsi Jawa Barat
 - 5.1. Kab. Tasikmalaya
 - 5.2. Kab. Sumedang
 - 5.3. Kab. Subang
 - 5.4. Kab. Kuningan
 - 5.5. Kab. Garut
6. Provinsi Jawa Tengah
 - 6.1. Kota Semarang
 - 6.2. Kab. Semarang
 - 6.3. Kab. Grobogan
 - 6.4. Kab. Blora

- 6.5. Kab. Rembang
 - 6.6. Kab. Demak
 - 6.7. Kab. Pati
 - 6.8. Kab. Kendal
 - 6.9. Kab. Cilacap
 - 6.10. Kab. Banyumas
 - 6.11. Kab. Purbalingga
 - 6.12. Kab. Banjarnegara
 - 6.13. Kab. Pekalongan
 - 6.14. Kab. Pemasang
 - 6.15. Kab. Tegal
 - 6.16. Kab. Brebes
 - 6.17. Kab. Batang
 - 6.18. Kab. Purworejo
 - 6.19. Kab. Wonosobo
 - 6.20. Kab. Magelang
 - 6.21. Kab. Klaten
 - 6.22. Kab. Karanganyar
 - 6.23. Kab. Temanggung
 - 6.24. Kab. Kebumen
 - 6.25. Kab. Wonogiri
 - 6.26. Kab. Boyolali
 - 6.27. Kab. Sragen
 - 6.28. Kab. Sukoharjo
7. Provinsi Nusa Tenggara Timur
 - 7.1. Kab. Sumba Barat
 - 7.2. Kab. Manggarai Barat
 - 7.3. Kab. Rote Ndao
 - 7.4. Kab. Timor Tengah Utara
 - 7.5. Kab. Kupang
 - 7.6. Kab. Timor Tengah Selatan
 - 7.7. Kab. Alor
 - 7.8. Kab. Lembata
 - 7.9. Kab. Sikka
 - 7.10. Kab. Manggarai
8. Provinsi Kalimantan Selatan
 - 8.1. Kab. Tanah Laut
 - 8.2. Kab. Hulu Sungai Selatan
 - 8.3. Kab. Hulu Sungai Utara
 - 8.4. Kab. Balangan
 - 8.5. Kab. Kota Baru
 - 8.6. Kab. Banjar
 - 8.7. Kab. Barito Kuala
 - 8.8. Kab. Tanah Bumbu
9. Provinsi Sulawesi Selatan
 - 9.1. Kab. Wajo
 - 9.2. Kab. Sidrap
 - 9.3. Kab. Bulukumba
 - 9.4. Kab. Tana Toraja
10. Provinsi Sulawesi Barat
 - 10.1. Kab. Majene
11. Provinsi Sulawesi Tengah
 - 11.1. Kab. Poso

- 11.2. Kab. Morowali
- 11.3. Kab. Banggai Kepulauan
- 11.4. Kab. Tojo Una-Una
- 11.5. Kab. Donggala
- 11.6. Kab. Parigi Moutong
- 11.7. Kab. Buol

- 12. Provinsi Gorontalo
 - 12.1. Kab. Gorontalo
 - 12.2. Kab. Boalemo

- 13. Provinsi Maluku
 - 13.1. Kab. Maluku Tengah

- 14. Provinsi Papua Barat
 - 14.1. Kab. Manokwari

**Status Pembentukan Panitia Kemitraan Kabupaten/Kota
Lokasi Pamsimas II TA 2013 (per 5 Mei 2013)**

No	PROVINSI	KABUPATEN/KOTA	STATUS
1	SUMATERA BARAT		
		1 Kab. Agam	Sudah terbentuk
		2 Kab. Dharmasraya	Belum terbentuk
		3 Kota Sawahlunto	Belum terbentuk
		4 Kab. Tanah Datar	Sudah terbentuk
		5 Kab. Pasaman Barat	Belum terbentuk
		6 Kab. Sijunjung	Belum terbentuk
		7 Kab. Padang Pariaman	Belum terbentuk
		8 Kab. Lima Puluh Kota	Sudah terbentuk
		9 Kab. Solok Selatan	Sudah terbentuk
		10 Kab. Pesisir Selatan	Sudah terbentuk
		11 Kota Padang	Belum terbentuk
		12 Kab. Solok	Sudah terbentuk
		13 Kab. Pasaman	Sudah terbentuk
2	RIAU		
		1 Kab. Kuantan Singingi	Sudah terbentuk
		2 Kab. Indragiri Hulu	Sudah terbentuk
		3 Kab. Indragiri Hilir	Sudah terbentuk
		4 Kab. Kampar	Belum terbentuk
		5 Kab. Rokan Hulu	Belum terbentuk
		6 Kab. Bengkalis	Sudah terbentuk
3	SUMATERA SELATAN		
		1 Kab. OKI	Sudah terbentuk
		2 Kab. Muara Enim	Sudah terbentuk
		3 Kab. Lahat	Sudah terbentuk
		4 Kab. Musi Rawas	Sudah terbentuk
		5 Kab. Musi Banyuasin	Sudah terbentuk
		6 Kab. OKU Selatan	Sudah terbentuk
		7 Kab. OKU Timur	Sudah terbentuk
		8 Kab. Ogan Ilir	Sudah terbentuk
4	BANTEN		
		1 Kab. Lebak	Belum terbentuk
		2 Kab. Serang	Sudah terbentuk
5	JAWA BARAT		
		1 Kab. Tasikmalaya	Sudah terbentuk
		2 Kab. Sumedang	Sudah terbentuk
		3 Kab. Subang	Belum terbentuk
		4 Kab. Kuningan	Belum terbentuk
		5 Kab. Garut	Belum terbentuk
6	JAWA TENGAH		
		1 Kab. Grobogan	Belum terbentuk
		2 Kab. Blora	Belum terbentuk
		3 Kab. Rembang	Belum terbentuk
		4 Kab. Demak	Sudah terbentuk
		5 Kota Semarang	Belum terbentuk
		6 Kab. Pati	Sudah terbentuk
		7 Kab. Semarang	Belum terbentuk
		8 Kab. Kendal	Belum terbentuk
		9 Kab. Cilacap	Belum terbentuk
		10 Kab. Banyumas	Belum terbentuk
		11 Kab. Purbalingga	Belum terbentuk
		12 Kab. Banjarnegara	Belum terbentuk

No	PROVINSI	KABUPATEN/KOTA	STATUS
		13 Kab. Pekalongan	Sudah terbentuk
		14 Kab. Pematang	Belum terbentuk
		15 Kab. Tegal	Belum terbentuk
		16 Kab. Brebes	Belum terbentuk
		17 Kab. Batang	Sudah terbentuk
		18 Kab. Purworejo	Belum terbentuk
		19 Kab. Wonosobo	Belum terbentuk
		20 Kab. Magelang	Belum terbentuk
		21 Kab. Klaten	Belum terbentuk
		22 Kab. Karanganyar	Belum terbentuk
		23 Kab. Temanggung	Sudah terbentuk
		24 Kab. Kebumen	Belum terbentuk
		25 Kab. Wonogiri	Sudah terbentuk
		26 Kab. Boyolali	Sudah terbentuk
		27 Kab. Sragen	Belum terbentuk
		28 Kab. Sukoharjo	Sudah terbentuk
7	KALIMANTAN SELATAN		
		1 Kab. Tanah Laut	Belum terbentuk
		2 Kab. Hulu Sungai Selatan	Sudah terbentuk
		3 Kab. Balangan	Sudah terbentuk
		4 Kab. Kota Baru	Belum terbentuk
		5 Kab. Banjar	Belum terbentuk
		6 Kab. Barito Kuala	Sudah terbentuk
		7 Kab. Hulu Sungai Utara	Belum terbentuk
		8 Kab. Tanah Bumbu	Belum terbentuk
8	SULAWESI TENGAH		
		1 Kab. Poso	Sudah terbentuk
		2 Kab. Buol	Belum terbentuk
		3 Kab. Morowali	Belum terbentuk
		4 Kab. Banggai Kepulauan	Sudah terbentuk
		5 Kab. Tojo Una-una	Sudah terbentuk
		6 Kab. Donggala	Belum terbentuk
		7 Kab. Parigi Moutong	Sudah terbentuk
9	SULAWESI SELATA		
		1 Kab. Wajo	Sudah terbentuk
		2 Kab. Sidrap	Sudah terbentuk
		3 Kab. Bulukumba	Belum terbentuk
		4 Kab. Tana Toraja	Belum terbentuk
10	SULAWESI BARAT		
		1 Kab. Majene	Sudah terbentuk
11	NTT		
		1 Kab. Sumba Barat	Belum terbentuk
		2 Kab. Manggarai Barat	Belum terbentuk
		3 Kab. Rote Ndao	Belum terbentuk
		4 Kab. Timor Tengah Utara	Belum terbentuk
		5 Kab. Kupang	Belum terbentuk
		6 Kab. Timor Tengah Selatan	Belum terbentuk
		7 Kab. Alor	Sudah terbentuk
		8 Kab. Lembata	Belum terbentuk
		9 Kab. Sikka	Belum terbentuk
		10 Kab. Manggarai	Belum terbentuk
12	GORONTALO		
		1 Kab. Gorontalo	Belum terbentuk
		2 Kab. Boalemo	Belum terbentuk
13	MALUKU		
		1 Kab. Maluku Tengah	Belum terbentuk
14	PAPUA BARAT		
		1 Kab. Manokwari	Belum terbentuk

Lampiran Surat Nomor: 2748 /Dt.6.3/05/2013

ANGGOTA PANITIA KEMITRAAN POKJA AMPL
KABUPATEN/KOTA ...

No.	NAMA	UNSUR/INSTANSI	NOMOR TELEPON		ALAMAT E-MAIL
			KANTOR	HP	
1.		Bappeda			
2.		Dinas PU			
3.		Dinas Kesehatan			
4.		Dinas PMD			
5.		Asosiasi BPSPAMS/BPSPAMS....			
6.		Asosiasi BPSPAMS/BPSPAMS....			
7.		Universitas.....			
8.		LSM/Yayasan			
9.		Forum Peduli Air & sanitasi....			

Ditetapkan di:,

Tanggal:.....

Ketua Pokja AMPL Kab/Kota.....

ttd

Nama

NIP.